

SKRIPSI

**PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA PAYAKUMBUH**

OLEH:

MUHAMMAD AIDIL FIKRI

1310112092

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK8)



Pembimbing :

Syofiarti S.H.,M.Hum 197405181999032001

Titi Fatimah S.H., M.H 197406162002122001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

**PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA PAYAKUMBUH**

**(Muhammad Aidil Fikri, BP 1310112092, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VIII),
Pembimbing Syofiarti, S.H., M.Hum dan Titin Fatimah, S.H., M.H**

ABSTRAK

Salah satu upaya untuk meningkatkan fungsi Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut memuat mengenai pengalihan beberapa jenis pajak pusat menjadi pajak daerah yang salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Untuk itu setiap daerah diwajibkan untuk melakukan berbagai macam persiapan demi merealisasikan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan beberapa pertanyaan terhadap wajib pajak PBB-P2. Kajian ditekankan pada pelaksanaan pemungutan PBB-P2 apakah telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh mengenai PBB-P2 dan melihat apa kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemungutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh belum terlaksana dengan baik karena masih terdapatnya beberapa kendala baik kendala yuridis maupun non-yuridis. Dampaknya adalah hasil penerimaan PBB-P2 tidak sebanding dengan target penerimaan PBB-P2 walaupun mengalami peningkatan terhadap pendapatan Kota Payakumbuh setelah pengalihan.